

## ABSTRAK

Muhammad Radhia Wardana: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian*, di bawah bimbingan I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., II. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak-Hak Perempuan dan Anak, Pascaperceraian

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Negara Republik Indonesia adalah seringkali terabaikannya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Pihak perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian. Padahal Secara normatif, hukum Islam telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Di sisi lain, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus menjadi perhatian yang serius dalam penegakan hukum di negara kita. Perempuan dan anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara harus hadir untuk melindungi keduanya agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka pascaperceraian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Kemudian Penulis akan mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang pokok permasalahan menurut hukum Islam (secara normatif) serta menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Selain itu, untuk menjamin hak-hak tersebut dilaksanakan, diperlukan suatu sistem pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya.

## ABSTRACT

Muhammad Radhia Wardana: *Legal Protection of the Rights of Women and Children After Divorce*, under the guidance of I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H., II. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. at Postgraduate State Islamic University Antasari Banjarmasin, 2022.

Keywords: Legal protection, rights of women and children, after divorce

What is quite worrying about the high divorce rate in the Republic of Indonesia is that the rights of women and children after divorce are often neglected. Women and children are a vulnerable group and really need legal protection from the state, because women and children are the parties most often become victims and feel the negative impact of a divorce. In fact, women and children are often in a weak and powerless position, so they cannot fight for and even get their rights which have been neglected due to divorce. Whereas normatively, Islamic law has provided guarantees about the rights of women and children that must be fulfilled after a divorce occurs. On the other hand, legally these rights are also recognized by state law and get guaranteed protection through various laws and regulations in Indonesia. Therefore, the powerlessness of women and children in fighting for their rights due to divorce must be a serious concern in law enforcement in our country. Women and children should get proper protection from the state through instruments and fair law enforcement. The state must be present to protect both of them so that their rights can be fulfilled, especially with regard to their post-divorce rights..

This research is a type of normative legal research, or commonly referred to as library research. The problems that have been formulated in this research will be answered or solved using a statute approach. On the other hand, this research also requires a conceptual approach based on Islamic law, which refers to the concepts and provisions formulated in Islamic law. Sources of data in this study obtained from library materials or literature that has to do with the object of research. The data collection technique (legal material) is done by using documentation. Then the author will examine and analyze all legal provisions on the subject matter according to Islamic law (normatively) and according to legislation (juridically), so that a deductive conclusion can be drawn, namely drawing conclusions from a general problem to concrete problems. faced..

The results of this study conclude that the judiciary as an institution of law enforcement and justice is indispensable and even plays a very important and strategic role to provide legal protection for the rights of women and children after divorce. The role of the judiciary through a fair judge's decision must be able to guarantee the protection of the rights of women and children post-divorce by accommodating these rights in the judge's decision and facilitating the

implementation system (execution). Judicial institutions must be able to become the last bastion of justice for justice seekers to obtain legal protection in fighting for the rights of neglected (unfulfilled) women and children post-divorce. In addition, to ensure that these rights are implemented, a system for implementing court decisions (execution) is needed that can be implemented effectively and efficiently, both in terms of time, procedures, and costs.